



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN PEJAGOAN

Jalan Kenanga Nomor 22 Pejagoan, Kodepos 54361
Telepon (0287) 383458, Laman www.kec-pejagoan.kebumenkab.go.id
Pos-el kpejagoan3@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 000.8.3.4 / 5 /2026

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA DI KECAMATAN PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang menetapkan arah kebijakan Layanan Informasi Publik di Badan Publik;
 - b. bahwa salah satu kebijakan Layanan Informasi Publik adalah penetapan Informasi Publik di Badan Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Informasi Publik di Lingkungan Kecamatan Pejagoan Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen yang terdiri dari Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta dan Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan Camat Pejagoan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 2 Januari 2026
Pk. Camat Pejagoan



Andri Kurniawan

LAMPIRAN:
 KEPUTUSAN CAMAT PEJAGOAN
 NOMOR 000.8.3.4/ 5/2026
 TENTANG
 DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG
 WAJIB TERSEDIA DI KECAMATAN
 PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK KECAMATAN PEJAGOAN
 KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN 2026**

NO.	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN BADAN PUBLIK		
1.	Nama Badan Publik	Berisi tentang nama Badan Publik atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dapat berupa cetak maupun online.	Selama berlaku
2.	Alamat Badan Publik	Berisi tentang nama jalan, nomor, kota/kab, provinsi, kode pos, no.tlp/fax dan alamat email/webmail. Dapat berupa cetak maupun online.	Selama berlaku
3.	Tugas Pokok dan Fungsi Badan Publik	Berisi tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Publik. Dapat berupa cetak maupun online.	Selama berlaku
4.	Struktur dan Organisasi Badan Publik	Berisi tentang Struktur dan Organisasi Badan Publik. Dapat berupa cetak maupun online.	Selama berlaku
5.	Visi dan Misi Badan Publik	Berisi tentang Visi dan Misi Badan Publik. Dapat berupa cetak maupun online.	Selama berlaku
6.	Profil singkat Pimpinan Badan Publik	Berisi tentang profil singkat Pimpinan Badan Publik dan/atau Pejabat Struktural Badan Publik. Dapat berupa cetak maupun online.	Selama berlaku
7.	Jumlah Penduduk	Berisi tentang jumlah penduduk setiap tahunnya. Dapat berupa cetak maupun online.	Selama berlaku
8.	Jam Pelayanan	Berisi tentang jam pelayanan Badan Publik. Dapat berupa cetak maupun online.	Selama berlaku
9.	Produk Layanan	Berisi tentang produk atau jenis layanan Badan Publik. Dapat berupa cetak maupun online.	Selama berlaku

10.	Standar Operasional Prosedur	Berisi tentang Standar Operasional Prosedur setiap produk/jenis layanan dan layanan pengaduan. Dapat berupa cetak maupun online.	Selama berlaku
11.	Layanan Pengaduan	Berisi tentang layanan pengaduan Badan Publik	Selama berlaku
B. INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN AKUNTABILITAS KINERJA			
12.	Kerangka Acuan Kerja Program/kegiatan	Berisi tentang Kerangka Acuan Kerja Program atau Kegiatan yang dilaksanakan Badan Publik. Dapat berupa cetak maupun online.	Selama berlaku
NO.	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
(1)	(2)	(3)	(4)
13.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Berisi tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya. Dapat berupa cetak maupun online.	Selama berlaku
14.	Rencana Strategis	Berisi tentang Renstra 2021-2026. Dapat berupa cetak maupun online.	Selama berlaku
15.	Perjanjian Kinerja	Berisi tentang Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural Badan Publik. Dapat berupa cetak maupun online.	Selama berlaku
16.	Rencana Kerja Tahunan	Berisi tentang Rencana Kerja Tahunan setiap tahunnya. Dapat berupa cetak maupun online.	Selama berlaku
17.	Rencana Aksi	Berisi tentang Rencana Aksi Badan Publik termasuk capaian Rencana Aksi tiap triwulan.	Selama berlaku
C. INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN KEUANGAN			
18.	Informasi Perencanaan Keuangan SKPD	Berisi tentang Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) baik murni maupun perubahan. Dapat berupa cetak maupun online.	Selama berlaku
19.	Laporan Realisasi Anggaran SKPD	Berisi tentang Laporan Realisasi Anggaran setiap tahunnya. Dapat berupa cetak maupun online.	Selama berlaku
20.	Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD	Berisi tentang catatan tambahan yang disertakan di akhir laporan keuangan. Dapat berupa cetak maupun online.	Selama berlaku
21.	Aset dan Inventaris SKPD	Berisi tentang Laporan Barang Milik Daerah, Kartu Inventaris Ruangan, Kartu Inventaris Barang setiap tahunnya. Dapat berupa cetak maupun online.	Selama berlaku



PIL. DATAMAT PEJAGOAN

ANDRI KURNIAWAN, S.STP.

Revisi

NIP. 198503082003121001